

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2026



Jl. APT. Pranoto No. 85 Kelurahan Sukarame



0541 - 662053 Fax. 0541 - 662053

Made with PosterMyWall.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan APT. Pranoto No.85 RT.III Kelurahan Sukarame Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053

Website : distransnaker.kukarkab.go.id E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id Tenggarong Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B- 136/DISTRANSNAKER/500.14.2.1/01/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- b. Bahwa nama pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses penyelesaian tugas dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan klembari apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Tenggara
Pada Tanggal : 15 Januari 2025



TEMBUSAN :

1. Masing-masing yang bersangkutan
2. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor : B- 136/DISTRANSNAKER/500.14.2.1/01/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 3. Ketua | : | Roni Nurhabibi, SE, M.Si (Perencana Ahli Muda) |
| 4. Anggota | : | |
-
- | | |
|-----|--|
| 1. | Hj. Syarifah Rositah, ST, MT (Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja) |
| 2. | Lukman, S.Sos, M.Si (Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) |
| 3. | Hj. Suharningsih, SH., MM (Kepala Bidang Hubungan Industrial) |
| 4. | Drs. Saiful Bahri, M.H (Kepala Bidang Transmigrasi) |
| 5. | Mariani, S.Sos |
| 6. | Hj. Ernawati, SE |
| 7. | Mokhammad Zaenal Fanani, S. Sos |
| 8. | Armada |
| 9. | Sri Minarti Ningsih |
| 10. | Sukri Rijal, SE |
| 11. | Desak Nyoman Ardaningsih, SH, MH |
| 12. | Firman Hidayat, S.Sos |
| 13. | Hidayat, S.Sos |
| 14. | Yayuk Suprpti |
| 15. | Munarto, SP |
| 16. | Urib Tri Widodo, SE |
| 17. | Deviansyah |
| 18. | Aspian Noor, S.Sos |
| 19. | Drs. Lesta Nugroho |
| 20. | Sri Plahesti, S.Pd |
| 21. | Helda Royani, SE |
| 22. | Lilik Siswati, S.Sos |
| 23. | Herwin Setiawan, S.Sos |
| 24. | Lisnawati, A.Md |
| 25. | Herdani Ahdyawati, S.Sos |





KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Visi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua OPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk didalamnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang kemudian dirumuskan dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas ini mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen ini merumuskan serta menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten kedalam Rencana Kerja Distransnaker Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran Pejabat beserta Staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas,


M. HATTA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670813 200012 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Pemyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	25
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	25
2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah	26
2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD.....	26
2.3.4 Rekomendasi.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	53
3.2.1 Tujuan.....	53
3.2.2 Sasaran.....	53

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
4.1. Program dan Kegiatan.....	56
4.2. Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan	56
4.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	56



BAB V

PENUTUP	72
5.1. Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan.....	72
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	73
5.3. Rencana Tindak Lanjut	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1 T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2025
Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Tahun 2024
Tabel 2 T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 3 T-C.31	Review Terhadap Rancangan RKPD 2026 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 4 T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 5 T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan Program Kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- a. Meningkatnya perencanaan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan,
 - b. Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang produktif dan berdaya saing di tingkat nasional.;
 - c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan informasi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan baru:
 - d. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan
- guna memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi serta untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendorong penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rancangan Akhir RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. Rancangan Akhir RENJA merupakan acuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dengan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
- c. Rancangan Akhir RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2026 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).



Mengingat arti strategis Rancangan Akhir RENJA Tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah no. 86 tahun 2017 tentang tata cara rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah, yang antara lain :

- a. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berjalan;
- b. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- c. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (outcome) indikator Kinerja Keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatar belakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Renja OPD) tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang erubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 163).
35. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
36. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program OPD yang telah mengakomodir usulan hasil musrenbang dari tiap Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) akan digunakan bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan



pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan program kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagai standart ukuran capaian keberhasilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2026.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sejumlah Rp 52.590.180.033,- (lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah). dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Alokasi anggaran sebesar Rp 15.094.099.333,- dengan realisasi sebesar Rp 12.552.570.451,- atau sebesar 82,16 % dan sisa anggaran sebesar Rp 2.541.528.882,-.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini merupakan salah satu penunjang program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara Kukar Siap Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 program penunjang ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta serta Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil ketiganya diampu oleh Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. Pagu dari program ini adalah Rp. 16.052.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.567.169.818,- atau sebesar 72,05%. Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.952.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.512.773.618,- atau 72,17% Target 577 Orang, dengan capaian 577 Orang atau 100%
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.335.000 atau sebesar 85,34% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.665.000,-



- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.240.000 atau sebesar 84,96% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.760.000,-

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan, dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah, yang di ampu oleh Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja serta 5 (lima) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.672.399.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.715.264.852,-, atau 88,96 % . Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.0000,- dengan realisasi Rp. 67.403.000,- atau 89,87%.
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Rp. 46.950.000,- atau 93,90%
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 93.399.000,- dengan realisasi Rp. 88.286.200,- atau 94,52%
- d. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan pagu anggaran Rp. 8.254.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.330.916.252,- atau 88,81 %
- e. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 181.709.400,- atau 90,85%

4. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja ini bertujuan untuk memastikan pihak swasta/perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta menyediakan dasar yang lebih baik untuk merencanakan pengembangan pencari kerja yang memanfaatkan sikap pekerja secara optimal dan tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah, yang di ampu oleh Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.394.740,- atau 94,39% Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.0000,- dengan realisasi Rp. 94.394.740,- atau 94,39%.



5. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial merupakan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dimana program ini diampu oleh Bidang Hubungan Industrial. Pagu program ini sebesar Rp. 11.271.341.700,- dengan realisasi Rp. 9.912.045.830,- atau 87,94%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.725.000,- atau 83,45%
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 362.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 254.749.080,- atau 70,37%
- c. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.098.000,- atau 78,19%
- d. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.125.000,- atau 84,25%.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.675.000,- atau 59,35%
- f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.386.000,- atau 82,72%
- g. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.609.341.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.429.412.350,- atau 88,87%, sub Kegiatan ini merupakan salah satu program Bupati untuk membantu Masyarakat miskin dalam pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Masyarakat bukan penerima upah yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut ini Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH	73,00	Persen	81,80	71,50	71,29	100	73,00	226	3,10
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Dokumen	8	8	8	100	3		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	5	5	5	100	3	13	87
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	3	3	3	100	3	9	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	Orang/ Bulan	14	14	14	100	73	101	122
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	4	4	100	1	6	120
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara									
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	1	1	100	1	3	60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara									
6	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi	1	Dokumen	0	1	1	100	1	2	200
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	15	Dokumen	3	3	3	100	1	7	47
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	5	5	3	60	5	13	130



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	73	Orang	55	73	0	0	83	138	189
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35	Orang	8	35	18	51	40	66	189
11	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	146	Paket	0	146	146	100	0	146	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum									
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2	1	1	100	1	4	80
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3	5	5	100	1	9	300
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	0	3	3	100	1	4	80
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Serta Rapat/Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	5	Paket	1	1	1	100	1	3	60
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	20	Paket	8	3	3	100	4	15	75
17	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	Paket	0	4	2	50	2	4	40
18	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	12	12	12	100	1	25	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	87	Laporan	24	87	87	100	57	168	193
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan									
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	110	Unit	0	102	100	98	3	103	94
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	1	1	1	100	0	2	29



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sapras pendukung gedung dan bangunan	199	Unit	199	1	1	100	0	200	101
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlekapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara									
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	Unit R2/R4	21	24	18	75	24	63	263
28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1	Paket	0	0	0	0	1	1	100
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	22,43	Persen	15,38	18,59	22,90	123	20,50	59	262
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan									
30	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	2082	Orang	348	535	535	100	507	1.390	67



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
31	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	50	LPTKS	4	20	6	30	0	10	20
32	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	70	Unit	0	65	65	100	0	65	93
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia									
33	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang dibina	15	Lembaga	11	15	15	100	15	41	273
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Produktif									
34	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil	25	UMKM	25	25	25	100	25	75	300
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data rencana tenaga kerja daerah									
35	Penyusunan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	15	15	15	100	15	45	300
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,37	Persen	8,02	8,39	13,75	164	10,37	32	3,10
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja									
36	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan	35	Orang	13	0	0	0	30	43	123
37	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja	25	Kecamatan	18	0	0	0	25	43	172
38	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Kesempatan Kerja	775	Orang	378	579	579	100	705	1.662	214
39	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75	Orang	0	50	50	100	0	50	67



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
40	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	75	Orang	0	10	10	100	0	10	13
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja									
41	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	5	Event	2	2	2	100	60	64	1.280
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan									
42	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	20	20	20	100	10	50	250
43	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20	Perusahaan	0	0	0	0	10	10	50
44	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	Laporan	2	2	2	100	2	6	100
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan									
45	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perselisihan yang dicegah	50	Perkara	15	15	15	100	15	45	90



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
46	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	405	Perkara	125	100	100	100	80	305	75
47	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	24	6	6	100	6	36	600
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	Lembaga	1	1	1	100	1	3	60
49	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	35.000	35.440	35.440	100	48.729	119.169	336
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	4	Dokumen	2	2	1	50	2	5	125
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans									
50	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5	Kawasan	1	1	1	100	1	3	60
51	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	3	Kawasan	2	2	2	100	1	5	167
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan									



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025	
						Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
52	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	Kepala Keluarga	21	30	30	100	40	91	182
53	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukiman	1	1	1	100	15	17	113



Selanjutnya rincian realisasi anggaran Tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targe t	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah			15.094.099.333	12.552.570.451	82,16
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			450.000.000	321.931.554	71,54
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	350.000.000	259.613.054	74,17
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.000.000	62.318.500	62,31
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			10.139.876.880	8.653.286.357	85,33
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/ Bulan	9.989.876.880	8.533.818.557	85,42
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	150.000.000	119.467.800	79,64
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			82.200.000	65.600.000	79,80
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	82.200.000	65.600.000	79,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			385.000.000	274.428.570	71,28
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	32.338.741	79,64
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	30.000.000	27.550.000	91,83
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	100.000.000	66.601.135	66,60



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targe t	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83	Orang	50.000.000	30.706.051	61,41
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	155.000.000	117.232.643	75,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			959.700.000	804.551.417	83,83
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.700.000	29.151.000	98,15
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	50.000.000	29.403.700	58,80
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	13.360.400	26,72
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	180.000.000	163.190.850	90,66
15	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	Paket	75.000.000	36.194.000	48,25
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000	15.514.500	62,05
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	57	Laporan	450.000.000	420.495.567	93,44
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			1.601.000.000	1.145.504.250	71,54
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	1.601.000.000	1.145.504.250	71,54
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1.100.280.522	1.002.596.053	91,12
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000	3.990.000	99,75
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	229.827.998	199.040.685	86,60
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000	79.325.000	79,32



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	766.452.524	720.240.368	93,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			376.041.931	284.672.250	75,70
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	276.041.931	188.499.350	68,28
24	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	96.172.900	96,17
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya			16.052.340.000	11.567.169.818	72,05
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			15.952.340.000	11.512.773.618	72,17
25	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	577	Orang	15.952.340.000	11.512.773.618	72,17
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			25.000.000	21.335.000	85,34
26	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	25.000.000	21.335.000	85,34
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			25.000.000	21.240.000	84,96
27	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	25.000.000	21.240.000	84,96
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja			100.000.000	94.394.740	94,39
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			100.000.000	94.394.740	94,39
28	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota	15	Orang	100.000.000	94.394.740	94,39
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri			8.672.399.000	7.715.264.852	88,96



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targe t	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			8.472.399.000	7.533.555.452	88,91
29	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30	Orang	75.000.000	67.403.000	89,87
30	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Orang	50.000.000	46.950.000	93,90
31	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30	Orang	93.399.000	88.286.200	94,52
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	705	Orang	8.254.000.000	7.330.916.252	88,81
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			200.000.000	181.709.400	90,85
33	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	60	Orang	200.000.000	181.709.400	90,85
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial			11.271.341.700	9.912.045.830	87,94
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			462.000.000	330.349.480	71,50
34	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10	Perusahaan	50.000.000	41.725.000	83,45
35	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	362.000.000	254.749.080	70,37
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			10.809.341.700	9.581.696.350	88,64



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targe t	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	Perkara	50.000.000	39.098.000	78,19
37	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80	Perkara	50.000.000	42.125.000	84,25
38	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	50.000.000	29.675.000	59,35
39	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	50.000.000	41.386.000	82,72
40	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	10.609.341.700	9.429.412.350	88,87
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan			1.100.000.000	664.909.600	60,44
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan kawasan Desa/Kimtrans			1.100.000.000	664.909.600	60,44
41	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigras	1	Kawasan	800.000.000	534.359.100	66,79
42	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	300.000.000	130.550.500	43,51
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi			300.000.000	284.095.500	94,69
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000	284.095.500	94,69
43	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40	Kepala Keluarga (KK)	150.000.000	138.697.000	92,46
44	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	Jumlah Satuan Permukiman yang	15	Satuan Permukim	150.000.000	145.398.500	96,93



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	%
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Targe t	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		an			
JUMLAH					52.590.180.033	42.790.450.791	81,36

Berdasarkan tabel diatas pagu anggaran sebesar Rp. 52.590.180.033,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 42.790.450.791,- atau sebesar 81,36%. Diharapkan tahun 2025 persentase penyerapan anggaran lebih baik dari tahun sebelumnya.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Distransnaker, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

“Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.”

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan **fungsi :**

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Indikator Kinerja Utama (IKK) urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian .

Permendagri Nomor 73 tahun 2010 tentang indikator kinerja kunci (IKK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditetapkan 3 indikator kunci, yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dengan rumusan pencari kerja yang dilatih dibagi dengan data awal renstra dikali 100.

1. Pencari kerja yang terdaftar ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100.

Urusan Ketransmigrasian

1. Perencanaan Penyediaan Pencadangan Lahan Rencana Kawasan Transmigrasi dengan target 3 rencana Kawasan pengembangan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja seperti pada Tabel 2 T-C.30 berikut :



Tabel 2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Sumber : RENSTRA 2025– 2030

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (input) =(IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	4,22	4,85	5,82	6,7	7,7	8,85	22,9	22,77	4,22	4,85	
2	Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal		Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	2,11	2,21	2,43	2,91	3,34	3,84	13,7	18,86	2,11	2,21	
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan		Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan		Indeks Transmigrasi	25	35	50	75	90	100	1	4	2	25	
5	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.80	72.00	72.30	73.00	73.50	74.00	81,80	71,50	71,76	72	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
3. Percepatan Transformasi ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi yang eksklusif;
4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Ekseabilitas dan Konektivitas Infrastruktur;
7. Regulasi Penetapan Kawasan dan Pemanfaatan HPL Transmigrasi;
8. Tahapan Rencana Penyusunan RKT belum Sepenuhnya dapat di Tindaklanjuti di Daerah.

Isu tersebut yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan tugas fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga dengan Program/Kegiatan Provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah masih kurangnya sumber daya aparatur utamanya makin berkurang tenaga fungsional seperti pengantar kerja dan mediator serta masih belum adanya tenaga fungsional instruktur pelatihan. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS/ASN biasa. Selain hal tersebut ada juga Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut ;

1. Belum Optimalnya koordinasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Pengelola Data .
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan



5. Penduduk usia kerja atau angkatan kerja Meningkat tidak diimbangi dengan peluang kerja;
6. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat;
7. Rendahnya keterampilan/vokasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif
8. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
9. Kurang keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
10. Pembangunan dipedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya insfrastruktur (jalan, jembatan sarana dan prasarana)

Hambatan :

1. Lokasi yang tersebar di kab. Kutai Kartanegara.
2. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
3. Kurangnya tenaga kerja fungsional instruktur.
4. Perubahan regulasi tentang tata cara perencanaan Kawasan transmigrasi (Permendes No.05 Tahun 2021)

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi kepala Daerah

Belum Optimalnya koordinasi dan pencapaian target program Bupati Kutai Kartanegara antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan yaitu jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan jumlah tenaga kerja ditempatkan. Kekurangan SDM tenaga kerja fungsional instruktur ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja OPD seperti yang telah ditargetkan, sehingga pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja menjadi tidak optimal. Disamping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan program-program sektoral untuk dapat fokus pada pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan di pasar kerja, serta tidak tercapainya target pencapaian program kuar siap kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD urusan Ketransmigrasian, Masih adanya 12 (dua belas) lahan HPL yang dapat dimanfaatkan untuk Pelaksanaan Transmigrasi Lokal, tetapi kewenangan pemanfaatan lahan ada pada Kementrian Transmigrasi sehingga Kabupaten tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Tersusunya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi di kecamatan Kota Bangun dan kecamatan Tabang tetapi kenyataannya sampai saat ini belum diterbitkannya Penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi tersebut sehingga tidak dapat dilaksanakan tahap berikutnya, Urusan Ketenagakerjaan yaitu fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah atau belum memiliki keahlian untuk memasuki pasar kerja, angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara saai ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau low skill sehingga kurang dapat bersaing dengan pekerja diluar wilayah Kutai



Kartanegara. Data Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari 392.275 orang angkatan kerja saat ini terdapat 376.150 orang yang bekerja, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 16.125 orang yang mencari pekerjaan/pengangguran. Dari data tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh OPD untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Tantangan lain dalam meningkatkan pelayanan OPD adalah masuknya Investasi di berbagai bidang di Ibu Kota Negara mengakibatkan banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan persaingan berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara signifikan.

Peluang-Peluang (opportunities) dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut:

- a. Program Tranmigrasi membantu mengurangi kepadatan penduduk di kota besar dan meningkatkan pembangunan daerah terpencil.
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Terbukanya kasempatan bagi tenaga kerja yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah keterampilan dan skill tenaga kerja sasuai dengan pasar kerja dan melakukan pelatihan bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi pencari kerja dalam bersaing mendapatkan pekerjaan
- d. Akses informasi yang semakin cepat, tepat dan mudah

2.3.4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk urusan Ketransmigrasian untuk segera menindaklanjuti proses penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi yang sudah ada. Untuk urusan Ketenagakerjaan peluang kesempatan kerja yaitu memperbanyak pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing pencari kerja. Untuk kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga dapat berwirausaha mandiri. untuk dapat berwirausaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan paska pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya menyerap tenaga kerja non formal.



2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal Renja di aplikasi perencanaan SIPD RI yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin ke dalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja. Adapun rincian Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan Hasil Analisis Kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 3 T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,00	21.813.041.898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,00	15.039.494.450	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.100.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	550.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	350.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
4	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	9.687.370.252	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	10.689.842.450	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distrans naker	Jumlah Aparatur	68 Orang	9.437.370.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distrans naker	Jumlah Aparatur	68 Orang	10.439.842.450	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kab. Kukar					Kab. Kukar				
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	50.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	150.000.000	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	50.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Distrans naker	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	150.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Distrans naker	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	50.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	1.120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Laporan	185.000.000	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Orang	350.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Orang	-	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	40.000.000	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	70.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	25.000.000	
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	370.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	1.430.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Layanan	410.000.000	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
26	Penyediaan Bahan/Material	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.000.000	
29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	51 Unit	4.668.319.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Unit	1.190.000.000	
31	Pengadaan Mebel	Distrans naker Kab.	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Distrans naker Kab.	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 Unit	100.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kukar					Kukar				
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	1.950.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	990.000.000	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	100.000.000	
34	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	-	
35	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	34 Unit	575.719.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	34 Unit	-	
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	1.192.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	-	
VI I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.659.232.646	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.088.492.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.235.232.646	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	666.492.000	
VI II	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	1.948.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	826.160.000	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000	
44	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	271.960.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	100.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang	25,69	7.196.220.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang	25,69	4.150.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Meningkat Produktivitasnya			PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Meningkat Produktivitasnya			
I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	6.996.220.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	400 orang	4.020.000.000	
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	6.996.220.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	4.020.000.000	
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lemba ga	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lemba ga	-	
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	-	
II	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lemba ga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lemba ga	50.000.000	
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lemba ga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lemba ga	50.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
III	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Dokumen	-	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Dokumen	-	
5	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dokumen	-	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dokumen	-	
IV	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	50.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	30.000.000	
6	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	30.000.000	
V	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	100.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	
7	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1 Dokumen	100.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1 Dokumen	50.000.000	
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100%	150.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100%	75.000.000	
I	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	75.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	75.000.000	
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,76 %	6.450.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,76 %	3.405.000.000	
I	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	5.900.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	3.030.000.000	
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	150.000.000	
2	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	150.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	70.000.000	
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	200.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	120.000.000	
4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	250.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	200.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	450 Orang	5.000.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	450 Orang	2.490.000.000	
II	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin LPTKS	2 Dokumen	100.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin LPTKS	2 Dokumen	50.000.000	
6	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	100.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	50.000.000	
III	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	300.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	250.000.000	
7	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	250.000.000	
IV	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang terlindungi	50 Orang	150.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMI yang terlindungi	50 Orang	75.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8	Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	150.000.000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	75.000.000	
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100%	18.550.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100%	10.600.000.000	
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	20 Perusahaan	1.850.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	60 Perusahaan	350.000.000	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	500.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan	100.000.000	
2	Pendaftaran	Kab.	Jumlah Perusahaan	5		Pendaftaran	Kab.	Jumlah Perusahaan	60		



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kutai Kartanegara	yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	500.000.000	Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kutai Kartanegara	yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	100.000.000	
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	850.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	150.000.000	
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	16.700.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	150 Perusahaan	10.250.000.000	
4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkar	2.800.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkar	150.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	500.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	
6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	500.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	
7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	500.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	150.000.000	
8	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	12.400.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	9.650.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	72,73	1.050.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	72,73	100.000.000	
I	Program Perencanaan Kawasan		Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	1 Dokumen	1.050.000.000	Program Perencanaan Kawasan		Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	1 Dokumen	100.000.000	
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	-	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	-	
2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	150.000.000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	50.000.000	
3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7981.89 Ha	600.000.000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7981.89 Ha	-	
4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	300.000.000	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	50.000.000	
JUMLAH					55.209.261.898	JUMLAH				33.369.494.450	



Pada tabel 3 tersebut Rancangan Akhir RKPD Program dan Kegiatan terdapat 6 (enam) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 55.209.261.898,-** Setelah dilakukan Analisis Kebutuhan Menjadi 63 (enam puluh tiga) Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 33.369.494.450,-** yang meningkat dari pagu Akhir RKPD , uraian penambahan Pagu anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pagu anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 21.813.041.898,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp. 15.039.494.450,-. Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp. 1.100.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran menjadi Rp. 550.000.000,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp. 9.687.370.252,- setelah dilakukan analisis kebutuhan mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.439.842.450,- kenaikan tersebut disebabkan penyesuaian penambahan PPPK.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 100.000.000,-
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebelumnya memiliki pagu sebesar Rp. 1.120.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 185.000.000,- Penurunan pagu disebabkan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, selain itu Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp. 1.430.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 410.000.000,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki pagu sebesar Rp. 4.668.319.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 1.190.000.000,- Pengurangan pagu disebabkan optimalisasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.659.232.646,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 1.088.492.000,- Penurunan tersebut disebabkan sebagian Non ASN sudah berubah status menjadi PPPK.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 1.948.120.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 826.160.000,-



2. Program Hubungan Industrial

Pagu Anggaran Program Hubungan Industrial sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 18.550.000.000,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp. 10.600.000.000,-. Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.850.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 350.000.000,-
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16.700.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 10.250.000.000,-

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 150.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan tersebut pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 75.000.000,-

4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pagu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 7.196.220.000,- setelah di analisis kebutuhan menjadi Rp. 4.150.000.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan terdapat kegiatan yang mengalami penurunan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang semula Rp 6.996.200.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 4.020.000.000,-
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang semula Rp. 50.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan tidak mengalami kenaikan dan penurunan
- Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil yang semula Rp. 50.000.000,- setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan menjadi Rp. 30.000.000,-
- Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 100.000.000,- setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan menjadi Rp. 50.000.000,-

5. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Penempatan Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 6.450.000.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan bertambah menjadi Rp. 3.405.000.000,- perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- Pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan semula sebesar Rp. 5.900.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 3.030.000.000,-



- Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 50.000.000,-
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sebesar Rp. 300.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 250.000.000,-
- Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 150.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 75.000.000,-

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi sesuai Rancangan RKPD sebesar Rp. 1.050.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 100.000.000,- perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Program Perencanaan Kawasan sebesar Rp. 1.050.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 100.000.000,-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Tahun 2026 ini berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distransnaker telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Distransnaker Kab. Kukar tahun 2026. Berdasar hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaahan renstra kementerian/lembaga dan Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sesuai dengan kamus usulan yang sudah disampaikan kepada pihak kecamatan dan desa untuk mempermudah dalam pengusulan program kegiatan yang sesuai dengan program kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dan selanjutnya di usulkan dalam selanjutnya di entri dalam aplikasi SIPD RI. Proses selanjutnya di Verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari hasil verifikasi Bappeda dalam Aplikasi SIPD Tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memverivikasi usulan masyarakat dalam SIPD sesuai dengan kamus usulan guna penentuan apakah usulan tersebut akan ditindak lanjuti atau di kembalikan kepada masyarakat.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sesuai isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan di Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja; serta Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	320 Orang	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
1	Pelatihan Diksar Gada Pratama	Kabupaten Kutai Kartanegara		100 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pelatihan Ahli K3 Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pelatihan Forklift	Kabupaten Kutai Kartanegara		15 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pelatihan Instrumen Level 1	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pelatihan Operator Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pelatihan Scaffolding	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pelatihan Welder 4G	Kabupaten Kutai Kartanegara		15 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pelatihan Welder 3G	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	249 Orang	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja		
1	Pembekalan Tata Boga	Kecamatan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa (Muara Jawa Tengah) Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu) Kecamatan Loa Kulu (Loh Sumber) Kecamatan Sebulu (Selerong) Kecamatan Kota Bangun Seberang Kecamatan Kenohan (Teluk Bingkai)		98 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
		Kecamatan Marangkayu (Sebuntal dan Semangko)			
		Kecamatan Samboja (Handil Baru)			
2	Pembekalan Menjahit	Kecamatan Muara Jawa		51 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
		Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu)			
		Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ulu)			
		Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ilir)			
		Kecamatan Muara Jawa (Muara Kembang)			
		Kecamatan Muara Jawa (Muara Jawa Tengah)			
3	Pembekalan Tata Rias	Kecamatan Muara Muntai (Kayu Batu)		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
		Kecamatan Anggana (Sidomulyo)			
		Kecamatan Muara Kaman (Teratak)			
4	Pembekalan Membatik	Kecamatan Samboja Barat (Bukit Merdeka)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pembekalan Pertukangan	Kecamatan Tenggarong (Rapak Lambur)		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
		Kecamatan Muara Kaman (Muara Kaman Ilir)			
		Kecamatan Muara Kaman (Teratak)			
		Kecamatan Muara Kaman (Cipari Makmur)			
6	Pembekalan Bengkel Motor	Kecamatan Marangkayu (Semangko)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pembekalan Barber Shop	Kecamatan Loa Janan (Loa Duri Ulu)		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) prioritas Nasional ke 4 (empat) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. Serta Prioritas 6 (Enam) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional, Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari Kebijakan Nasional di bidang ketenagakerjaan diperjelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait dengan adanya evaluasi terhadap kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kondisi aktual di lapangan serta potensi dampak yang dapat dicapai. Serta menelaah strategi yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Nasional dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan yang ada di tingkat regional atau lokal.

Keselarasan dengan Renstra Kementerian/Lembaga
1. Pengembangan SDM unggul melalui pelatihan berbasis kompetensi.
2. Penyediaan lapangan kerja layak untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
3. Penguatan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja.
4. Pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi lokal.
5. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan.
6. Optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat
- b. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya
- c. Meningkatkan informasi lowongan kerja



- d. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerimaan tenaga kerja
- e. Optimalisasi informasi lowongan kerja dan tidak lanjut dari program yang telah dijalankan
- f. Meningkatkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
- g. Meningkatkan pelayanan kepersertaan jamsostek
- h. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- i. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - Menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial (HI)
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi

Urusan Ketransmigrasian

- a. Telah dilaksanakannya penyempurnaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun, dan penyusunan rencana kawasan Kecamatan Tabang. Untuk RKT Kecamatan Kota Bangun menunggu hasil penilaian dari TIM Pusat untuk penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi.
- b. Setelah adanya penetapan RKT dari Pemerintah Pusat akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Permukiman (RTSKP).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Distransnaker Kab. Kukar adalah sebagai berikut :

No	Nama Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	
4.	Program Hubungan Industrial	APBD	Bidang Hubungan Industrial
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	Bidang Transmigrasi



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan ini berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan diarahkan untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

1. Meningkatkan peluang kerja bagi pencari kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang kompetitif, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
2. Meningkatkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan terarah.

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing di tingkat nasional;
Indikator Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan informasi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan baru.
Indikator Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui akses informasi pasar kerja online, bursa kerja, dan kegiatan pendukung lainnya.
3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perusahaan
Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial. Dan
4. Meningkatnya perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
Indikator Sasaran: Persentase Ketersediaan Fasilitas Infrastruktur Penunjang di kawasan transmigrasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.



Untuk mewujudkan Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi		Tingkat Kesempatan Kerja	96,92	97,59	97,23	97,54	97,83
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	4,85	5,82	6,70	7,70	8,85
		Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	2,21	2,43	2,91	3,34	3,84
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitasi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi		'Indeks Transmigrasi	25	35	50	75	100
		'Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Transmigrasi	0,00	23,89	24,10	30,51	21,50
			Pertumbuhan Luasan Lahan yang dimanfaatkan melalui IPT	3,20%	3,50%	3,52%	3,52%	3,55%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	91,40	91,50	91,55	91,68	91,72



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72.00	72.30	73.00	73.50	74.00

Untuk mencapai Misi Dinas telah ditetapkan Indek Kinerja Utama (IKU) sebagai alat mengukur sekaligus pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketrasmigrasian dengan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi.
- Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya
- Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri
- Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan : Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, dengan Visi : **"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."**, dan Misi ke-1 yaitu **Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial**, dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah **"PROGRAM ETAM SEJAHTERA"**.

4.2 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian, kajian usulan program/kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan Perubahan Renja OPD terdahulu.

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Program yang dilaksanakan RPJMD Tahun 2025-2029 secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (Dinas) maupun aspek eksternal (Masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta maupun nasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

4.3 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 terdiri atas 6 (Enam) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan, dan 63 (Enam



Puluh Tiga) Sub Kegiatan Pendukung pelaksanaan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran Program : Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 15.039.494.450,-

Kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 550.000.000,-

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 10.689.842.450,-

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,-

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 185.000.000,-

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 410.000.000,-

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 1.190.000.000,-

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 1.088.492.000,-

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 826.160.000,-

- **Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja

Pagu Anggaran : Rp. 4.150.000.000,-

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pagu Anggaran : Rp. 4.020.000.000,-

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-



c) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000,-

d) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-

- **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal

Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Kegiatan :

a) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000,-

- **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor Formal

Pagu Anggaran : Rp. 3.405.000.000,-

Kegiatan :

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp. 3.030.000.000,-

b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran ; Rp. 50.000.000,-

c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-

d) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000,-

- **Program Hubungan Industrial**

Sasaran Program : Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan Antara Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dengan Perusahaan

Pagu Anggaran : Rp. 10.600.000.000,-

Kegiatan :



- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. 350.000.000,-

- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp. 10.250.000.000,-

- **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

Sasaran Program : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Kegiatan :

- a) Program Perencanaan Kawasan

Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun Program dan Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah, program urusan wajib dan program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini :



Tabel 5 T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	100,00	15.039.494.450	APBD		100,00	16.325.417.208
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	6 Dokumen	550.000.000	APBD		6 Dokumen	800.000.000
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	200.000.000
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	3 Laporan	100.000.000	APBD		3 Laporan	300.000.000
4		Penyelenggaraan validasi data pendukung statistik sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
5		Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Data	200.000.000	APBD		1 Data	150.000.000
6		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	50.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Daerah							
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	4 Laporan	10.689.842.450	APBD		4 Laporan	9.640.024.562
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur	Distransnaker Kab. Kukar	68 Orang	10.439.842.450	APBD		68 Orang	9.440.024.562
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	4 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
10		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	3 Laporan	100.000.000	APBD		3 Laporan	150.000.000
11		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-
12		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-
13		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
IV		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	7 Laporan	185.000.000	APBD		7 Laporan	450.000.000
14		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distransnaker Kab. Kukar	96 Orang	-	APBD		96 Orang	-
15		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	-
16		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
17		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
18		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Orang	70.000.000	APBD		12 Orang	150.000.000
19		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	96 Orang	25.000.000	APBD		96 Orang	50.000.000
20		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	25 Orang	-	APBD		25 Orang	150.000.000
V		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	10 Layanan	410.000.000	APBD		10 Layanan	1.330.000.000
21		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Disediakan							
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	200.000.000
24		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000
25		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	4 Paket	20.000.000	APBD		4 Paket	150.000.000
26		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	150.000.000
27		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	110.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000
29		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
30		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Distransnaker Kab. Kukar	2 Unit	1.190.000.000	APBD		51 Unit	1.420.000.000
31		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	100.000.000	APBD		3 Unit	-
32		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	990.000.000	APBD		3 Unit	-
33		Pengadaan Peralatan dan	Jumlah unit Peralatan dan	Distransnaker	10 Unit		APBD		10 Unit	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kukar		100.000.000				200.000.000
34		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-
35		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	1.000.000.000
36		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	34 Unit	-	APBD		34 Unit	220.000.000
37		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	12 Bulan	1.088.492.000	APBD		12 Bulan	1.659.232.646
38		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	2.000.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
39		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	350.000.000	APBD		12 Laporan	350.000.000
40		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	70.000.000
41		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	666.492.000	APBD		12 Laporan	1.235.232.646
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	Distransnaker Kab. Kukar	4 Jenis	826.160.000	APBD		4 Jenis	876.160.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang Dipelihara							
42		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Distransnaker Kab. Kukar	6 Unit	248.160.000	APBD		6 Unit	248.160.000
43		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Distransnaker Kab. Kukar	11 Unit	28.000.000	APBD		11 Unit	28.000.000
44		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Distransnaker Kab. Kukar	2 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
45		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	-
46		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	250.000.000
47		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	38 Unit	100.000.000	APBD		38 Unit	250.000.000
II		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	25,69	4.150.000.000	APBD		26,49	5.600.000.000
IX		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	400 orang	4.020.000.000	APBD		300 orang	5.500.000.000
48		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	400 Orang	4.020.000.000	APBD		300 Orang	5.500.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			kompetensi							
49		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	Lembaga	-			Lembaga	-
50		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Unit	-	APBD		Unit	-
X		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	50.000.000	APBD		15 Lembaga	-
51		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	50.000.000	APBD		15 Lembaga	-
XI		Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-			Dokumen	-
52		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-			Dokumen	-
XII		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	30.000.000	APBD		Perusahaan	-
53		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	30.000.000	APBD		25 Perusahaan	-
XIII		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Persen	50.000.000	APBD		25 Persen	100.000.000
54		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			peningkatan produktifitas							
III		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100%	75.000.000	APBD		100%	-
XIV		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	-
55		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	75.000.000	APBD		20 Orang	-
IV		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	10,76%	3.405.000.000	APBD		26,85%	2.500.000.000
XV		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	Kab. Kutai Kartanegara	2 Layanan	3.030.000.000	APBD		2 Layanan	2.050.000.000
56		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	150.000.000	APBD		60 Orang	-
57		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	70.000.000	APBD		60 Orang	150.000.000
58		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	120 Orang	120.000.000	APBD		120 Orang	200.000.000
59		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang	200.000.000	APBD		30 Orang	200.000.000
56		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	450 Orang	2.490.000.000	APBD		680 Orang	1.500.000.000
XVI		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	100.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
60		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kab. Kutai Kartanegara	5 Lembaga	50.000.000	APBD		5 Lembaga	100.000.000
XVII		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Kab. Kutai Kartanegara	1 Event	250.000.000	APBD		1 Event	200.000.000
61		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	250.000.000	APBD		100 Orang	200.000.000
XVII I		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang terlindungi	Kab. Kutai Kartanegara	Orang	75.000.000	APBD		Orang	150.000.000
62		Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	75.000.000	APBD		50 Orang	150.000.000
V		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.600.000.000	APBD		100%	11.574.700.000
XIX		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Kab. Kutai Kartanegara	60 Perusahaan	350.000.000	APBD		20 Perusahaan	600.000.000
63		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Kutai Kartanegara	60 Perusahaan	100.000.000	APBD		15 Perusahaan	100.000.000
64		Pendaftaran Perjanjian Kerja	Jumlah Perusahaan yang	Kab. Kutai	60		APBD		5	



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Bersama bagi Perusahaan	Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kartanegara	Perusahaan	100.000.000			Perusahaan	100.000.000
65					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000
XX					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	150 Perusahaan	10.250.000.000	APBD		150 Perusahaan	10.974.700.000
66					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000	APBD		50 Perkara	200.000.000
67					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000	APBD		100 Perkara	150.000.000
68					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	6 Asosiasi	150.000.000	APBD		6 Asosiasi	150.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
69		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	1 Lembaga	150.000.000	APBD		1 Lembaga	150.000.000
70		Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	48.729 Orang	9.650.000.000	APBD		48.729 Orang	10.324.700.000
VI		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara	72,73	100.000.000	APBD		81,82	1.200.000.000
XXI		Program Perencanaan Kawasan	Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	1.200.000.000
71		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
72		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kawasan	50.000.000	APBD		1 Kawasan	300.000.000
73		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	7981.89 Ha	-	APBD		7981.89 Ha	600.000.000
74		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
JUMLAH						33.369.494.450				37.200.117.208



Berdasarkan tabel diatas hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Program dan Kegiatan yaitu sebesar **Rp. 33.369.494.450,-** dan perkiraan maju rencana tahun 2027 sebesar **Rp. 37.200.117.208,-**



BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan tenaga kerja, yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dan Study Pendahuluan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2026 – 2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANHIR RENJA-PD) Tahun 2026, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam program prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tentang arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan perkiraan maju tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat Pelaksanaan sehingga target kinerja rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana tetapi juga meliputi tahapan pengendalian Pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana karena itu prosedur standar pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana harus diselenggarakan sevara tepat syarat. Pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana dan memudahkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan Pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian program.

Selain itu perencanaan teknis Pelaksanaan tiap-tiap subkegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan Upaya



sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, yang memuat program kegiatan untuk mencapai sasaran Pembangunan tahun 2026, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut ;

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja mengacu pada :
 - a. Program Pembangunan Nasional;
 - b. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Study Pendahuluan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029;
 - d. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
 - e. Hasil evaluasi Pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya;
 - f. Berdasarkan program kegiatan atau kamus usulan serta hasil musrenbang yang berasal dari Masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
 - a. Sasaran dan indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Program dan kegiatan;
 - c. Indikator kinerja;
 - d. Rencana tingkat capaian (target);
 - e. Pagu indikatif dan perkiraan maju.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam Study Pendahuluan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029



5.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Tindak Lanjut yang direkomendasikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut :

1. Penetapan prioritas Pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat/swasta dalam program Pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
3. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
4. Adanya Upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja.

Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran urusan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tenggarong, Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas,


M. Hatta, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

